

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI**

KAMPAR TAHUN 2017

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ALMANITA

11775201208

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALMANITA
NIM : 11775201208
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
KAMPAR TAHUN 2017

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing

Afrinaldy Rustam, S.IP, M.si

NIP. 197404202014 111 001

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM.

NIP. 19620512-198903 1 003

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si

NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALMANITA
 NIM : 11775201208
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
 JUDUL : PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR DALAM
 MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
 MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
 KAMPAR TAHUN 2017

HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS, 17 JUNI 2021

DISETUJUI OLEH
 KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002



Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhaanahu Wata'ala, karena limpahan rahmat Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KAMPAR TAHUN 2017”**. ”. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan pada Nabi Muhammad Sollallahu ‘alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1). Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan maupun saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari semua pihak, maka melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih terutama :

1. Buat kedua orang tuaku serta keluarga lainnya yang selama ini selalu memberikan semangat, dorongan dan do'a yang tulus buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teruntuk teman-temanku yang tidak bisa disebut satu persatu yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis ucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penulisan maupun perkataan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, penulis selanjutnya dan bagi para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis,

ALMANITA
NIM: 11775201208



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Peranan.....	14
2.2. Komisi Pemilihan Umum	15
2.3. Partisipasi Politik	18
2.4. Pemilihan Kepala Daerah dan Otonomi Daerah	23
2.5. Pandangan islam tentang partisipasi politik.....	26
2.6. Penelitian Terdahulu	31
2.7. Definisi konsep	33
2.8. Kerangka pemikiran.....	34
2.9. Variabel/Indikator Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Informan Penelitian.....	40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Teknik Analisis Data.....	41
--------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	42
4.1.1. Sejarah Kabupaten Kampar	42
4.1.2. Aspek Geografis dan Demografi	43
4.1.3. Pemerintahan	44
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	45
4.2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar	46
4.2.1. Sejarah Berdirinya KPU Kabupaten Kampar	46
4.2.2. Dasar Hukum	50
4.2.3. Kewenangan.....	50
4.2.4. Visi dan Misi.....	50
4.2.5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	51
4.2.6. Bagian Atau Unit Kerja	56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017	64
5.1.1. Sosialisasi.....	65
5.1.2. Pendidikan Pemilih	79
5.2. Faktor penghambat peran komisis pemilihan umum kabupaten Kampar dalam meningkatkan politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kampar 2017	87
5.2.1. Minimnya Pendanaan.....	87
5.2.2. Minimnya sumberdaya manusia (personil).....	88

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	90
6.2. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Suara Sah Pilkada Kampar dari Tahun 2006-2017.....	7
1.2	Rekap Suara Pilkada Kabupaten Kampar 2017.....	9
1.3	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Partai Pengusung.....	10
1.4	Suara Sah dan Tidak Sah	10
2.1	Operasional Variabel Penelitian	35
3.1	Informan Penelitian	40
5.1	Pelaksanaan Wawancara Penelitian.....	64
5.2	Jadwal Sosialisasi Pedoman Teknis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017	68
5.3	Daftar Pasar Tujuan KPU Roadshow Pilkada 2017	71
5.4	Daftar sekolah Tujuan KPU Goes To School.....	75
5.5	Daftar sekolah Tujuan KPU Goes To Campuss	76
5.6	Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	77
5.7	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Basis Tertentu.....	82
5.8	personil sosialisasi dan pendidikan pemilih.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	34
4.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Kampar 2014 s/d 2019 Pemikiran	55



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislative, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam penyelenggaraan pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 C ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Sebagaimana diketahui bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Sesuai dengan tuntunan dan perkembangan dimanika masyarakat seperti yang tercermin dalam UUD Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.

Adapun Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Selanjutnya Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Kabupaten/Kota :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi acara di PPK.
7. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

4. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan.
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrument hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya strategis bagi lembaga KPU untuk melakukan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

disebutkan diatas dalam rangka membangun kesadaran partisipasi politik masyarakat sehingga terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang tidak wajar terjadi, hal tersebut dikarenakan seharusnya setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan akan tetapi situasi yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk itu sendiri, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami peningkatan Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum itu sendiri yang disebabkan KPU dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tidak mencapai target yang diinginkan.

Undang-undang nomor 07 tahun 2017 BAB XVII Pasal 448 Tentang partisipasi Masyarakat (1) dan (2) berbunyi; ayat(1)"Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi masyarakat" ayat (2)"Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi pemilu; b. pendidikan politik bagi pemilih; c. survey atau jajak pendapat tentang pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil pemilu. Selanjutnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PPKU) Nomor 10 Tahun 2018 ayat (1) angka 22 dan 25 menyebutkan bahwa 22."Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu". 25."Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu".



Beberapa usaha yang dilakukan KPU Kampar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati Kampar tahun 2017 adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil bupati secara meluas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pedoman teknis pilkada Kabupaten Kampar 2017 yang ditujukan pada partai politik, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa. Selain itu KPU Kampar juga mengadakan program KPU Roadshow, KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus. Dengan adanya kegiatan ini, KPU Kampar dapat memberikan edukasi tentang Pilkada pada pemilih pemula sehingga pemilih pemula dapat menemukan alasan kuat untuk memilih dan meminimalisir pemikiran yang apatis terhadap konteslasi politik

Edukasi politik yang dilaksanakan dalam pilkukada Kabupaten Kampar Tahun 2017, belum menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap proses politik dalam Pilkada Langsung Kabupaten Kampar Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan partisipasi Pilkada Kampar dari Tahun 2006-2017

Tahun	Jumlah DPT	Partisipasi	%
2006	385.170	259.909	67,48
2011	486.280	273.118	56,16
2017	480.976	327.248	68,04

Sumber: KPU Kabupaten Kampar Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yaitu tahun 2006 hanya 67,48%, tahun 2011 hanya 56,16% dan tahun 2017 hanya 68,04%. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah KPU sudah melakukan upayanya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat atau belum. Jumlah Pemilih dalam DPT 2011 cukup banyak, karena masih bergabung 5 desa yang menjadi rebutan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Namun pada tahun 2017 jumlah DPT dari 5 desa tersebut tidak termasuk lagi. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan politik yang dilakukan selama ini, belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pendidikan politik yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala atau hambatan, baik oleh KPU Kabupaten Kampar maupun oleh Partai Politik yang mengusung Paslon yang bertarung dalam Pilkada Langsung Kabupaten Kampar Tahun 2017.

Selanjutnya dari berbagai macam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam upaya menimbulkan kesadaran politik warga masyarakat sehingga meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 tersebut dinilai masih kurang efektif menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang berlandaskan asas, fungsi dan tujuan KPU itu sendiri. Selain daripada itu peneliti menilai bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu itu sendiri yang dilakukan dengan banyaknya agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

anggaran dana dan fasilitas yang memadai. Akan tetapi hal tersebut telah nampak dalam presentase tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 yaitu hanya 68,04% dengan jumlah Suara Sah 327.248 orang dari total keseluruhan daftar pemilih 480.976 orang.

Dengan mempertimbangkan betapa urgensinya pilkada langsung Kabupaten Kampar sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pesta demokrasi yang sudah dilakukan, sekali lagi kita manfaatkan sebenar-benarnya sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Media bersama komunikator politik yaitu calon pasangan kepala daerah beserta tim suksesnya dan partai pengusung juga lembaga-lembaga politik seperti KPU, Bawaslu dan lembaga lainnya yang terkait, bersatu memberikan pencerahan melalui kampanye yang jujur, adil dan juga menjunjung tinggi fair play guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Jika hal tersebut dapat dicapai, maka secara otomatis tingkat pendidikan politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat akan meningkat. Berikut ini adalah tabel rekap suara pilkada Kabupaten Kampar 2017;

Tabel 1.2 Rekap Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kampar 2017

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Muhammad Amin S.Ag.MH dan Drs.H. Muhammad Saleh	19,505	5,96
2.	Drs. H. Zulher, MS dan Dan Dasril Affandi, S.H, M.H	90.997	27,80
3.	H. Aziz Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH	106,085	32,43
4.	Drs. H. Jawahir M.Pd dan H. Bardansyah Harahap	11,597	3,54
5.	Rahmad Jevary Juniardo dan Khairuddin Siregar	99,048	30,27

Total Suara Sah	327,248	100
-----------------	---------	-----

Sumber : KPU Kabupaten Kampar, 2017

Masyarakat Kabupaten Kampar memiliki begitu banyak etnik suku terdapat di Kampar yaitu, Suku Ocu, Melayu, Jawa, Minang dan lain sebagainya. Jadi perolehan suara tersebut diatas berasal dari berbagai macam etnik suku yang berada di Kabupaten Kampar. Juga banyak Partai yang menjadikan tingginya intensitas politik di kabupaten Kampar. Berikut ini partai pengusung dari masing-masing calon, seperti:

Tabel 1.3 Calon Bupati Dan Wakil Bupati Beserta Partai Pengusung

No.	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI
1.	Muhammad Amin, S.Ag.MH dan Drs.H. Muhammad Saleh	-DEMOKRAT -HANURA	12 Kursi
2.	Drs.H. Zulher, MS dan Dasril Affandi, S.H, M.H	-PDIP -PAN	10 Kursi
3.	H. Aziz Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH	-PPP -NASDEM -GOLKAR -GERINDRA -PKS -PKB	23 Kursi
4.	Drs.H. Jawahir M.Pd dan H. Bardansyah Harahap	-Independen (Perseorangan)	40.925 KTP
5.	Rahmad Jevary Juniardo Dan Khairuddin Siregar	-Independen (Perseorangan)	74.837 KTP

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kampar 2017



Terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, sehingga diperoleh suara sah dan suara tidak sah, seperti:

Tabel 1.4 Suara Sah Dan Tidak Sah

Suara Sah	326.753
Suara Tidak Sah	6.428
Total Suara	483.674

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kampar 2017

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa, Pilkada di Kabupaten Kampar pada 05 Februari 2017 akhirnya di menangkan oleh nomor urut 3 pasangan Aziz Zaenal dan Catur Sugeng. penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kampar 2017 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kampar. Pendidikan Politik dari setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, termasuk Pilkada Langsung Kabupaten Kampar 2017, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat pemilih. Namun kenyatannya masih banyak kelemahan dalam mewujudkan pendidikan politik bagi masyarakat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Kampar 2017.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menjelaskan secara detail tentang bagaimana “**Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017**”. Dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk



dapat memperbaiki peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati Kampar tahun 2017.
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati Kampar tahun 2017.
2. Untuk menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya dibidang komunikasi politik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Kampar guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

3. Manfaat Metodologis

Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh dan menjadi bahan perbandingan dengan peneliti yang hendak mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini,

BAB III : Metode Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan diakhiri dengan metode analisis data



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses kelangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Jenis-jenis Peranan

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.2. Komisi Pemilihan Umum

2.2.1 definisi Komisi Pemilihan Umum

Menurut jimly asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

”Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (asshiddiqie, 2006:236-239).

Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan oleh UUD 1945, maka kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum dengan demikian adalah Penyelenggara Pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

“secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur didalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK” (Saldi Isra – mahkamahkonstitusi.go.id).

Berdasarkan penjelasan diatas kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penjelasan mengenai eksistensi Komisi Pemilihan Umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi Negara. Posisi Komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK” (Lukman Hakim, 2010:55).



Penjelasan diatas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara. Posisi Komisi Pemilihan Umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

2.3 Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik



warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai E-Activism: New Media and Political Participation in Europe. Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

2.3.2 Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk



hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

2.3.3 Model Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: Conventional dan Unconventional. Conventional adalah model klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (environmentalist), gerakan perempuan gelombang 2 (feminist), protes mahasiswa (students protest), dan teror.

2.3.4 Bentuk Partisipasi Politik

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu. Misalnya, Thomas M. Magstadt menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: (1) Opini publik;



(2) Polling; (3) Pemilihan umum; dan (4) Demokrasi langsung. Opini publik adalah gagasan serta pandangan yang diekspresikan oleh para pembayar pajak dan konstituen pemilu.

1. Opini Publik.

Opini publik yang kuat dapat saja mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu. Opini publik ini mengejawantah dalam bentuk lain partisipasi politik selanjutnya, berupa polling, pemilihan umum, dan demokrasi langsung.

2. Polling.

Polling adalah upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya. Melalui polling inilah, partisipasi politik (menurut Magstadt) warganegara menemui manifestasinya. Di dalam polling, terdapat aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya yaitu: straw polls, random sampling, stratified sampling, exit polling, dan tracking polls.

3. Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (Pemilu) erat hubungannya dengan polling. Pemilu hakikatnya adalah polling "paling lengkap" karena menggunakan seluruh warga negara benar-benar punya hak pilih (tidak seperti polling yang menggunakan sampel).



4. Demokrasi Langsung.

Demokrasi langsung adalah suatu situasi di mana pemilih (konstituen) sekaligus menjadi legislator. Demokrasi langsung terdiri atas plebisit dan referendum. Plebisit adalah pengambilan suara oleh seluruh komunitas atas kebijakan publik dalam masalah tertentu. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga BBM ketika parlemen mengalami deadlock dengan eksekutif, diambilah plebisit apakah naik atau tidak. Referendum adalah pemberian suara dengan mana warganegara dapat memutuskan suatu undang-undang. Misalnya, apakah undang-undang otonomi daerah perlu direvisi ataukah tidak, dan parlemen mengalami deadlock, dilakukanlah referendum.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah Dan Otonomi Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Otonomi Daerah Pada tahun 2004 bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat yang pelaksanaannya berlangsung relatif tertib dan demokratis. Dengan keberhasilan tersebut telah menjadikan dorongan atau modal semangat diselenggarakannya pilkada langsung oleh rakyat. Rakyat menuntut agar Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah pun dipilih secara langsung oleh rakyat daerahnya. Oleh karenanya pemerintah meresponnya dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hampir tidak dapat dipisahkan antara konsep pilkada dan otonomi daerah. Artinya, ada korelasi yang signifikan analisis pemilihan kepala daerah dengan pergeseran konsep otonomi daerah, bahwa otonomi daerah merupakan konteks bahkan prasyarat dari adanya pemilihan kepala daerah. Otonomi daerah, seperti diketahui muncul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karena adanya instrumen desentralisasi (Hoessein: 1993, Cheema dan Rondinelli: 1983, Smith: 1985).

Instrumen ini hadir karena mustahilnya kehidupan bernegara diselenggarakan secara sentralistik belaka. Yang harus diperhatikan bahwa baik dalam praktek maupun wacana akademik, instrumen ini memiliki serangkaian nilai yang ingin diraih. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan bernegara yang beradab, selanjutnya desentralisasi sendiri menjadi sepadan dengan nilai-nilai tersebut (Hossein: 1993). Nilai-nilai yang dimaksud antara lain: Nation-building, Demokratisasi, Local-autonomy, Efisiensi, dan Pembangunan sosial-ekonomi.

Otonomi daerah itu dimiliki masyarakat (Smith: 1985). Otonomi tidak mungkin diterima oleh pihak lain dalam satu negara bangsa yang menyelenggarakan desentralisasi kecuali masyarakat (lokal) yang ada. Sehingga otonomi ditujukan untuk kepentingan masyarakat (lokal). Otonomi harus mencerminkan problem-problem yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (lokal), otonomi pun harus menjadi wahana pencarian solusi problem lokal tadi. Bahkan para pakar hukum mengatakan, otonomi harus mampu menjadi tempat mengakomodasi kearifan lokal. Dalam hal demikian, masyarakat (lokal) yang menerima otonomi harus diberdayakan dan harus mampu bertindak demi kepentingan tersebut. Masyarakat harus memahami betul teknik pemerintahan di era modern sesuai konsep negara bangsa walaupun konsep pemerintahan tradisional dan bahkan masih terpelihara dalam kehidupan di tingkat Desa, tetapi konteks pemerintahan negara bangsa yang modernpun harus dikenal masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak terlindas oleh arus globalisasi dan tuntutan jaman yang semakin menuju peradaban universal.

Masyarakat lokal yang menerima otonomi dalam satu yurisdiksi wilayah tertentu tersebut dikenal sebagai daerah otonom. Pertama-tama tentu harus ada demokrasi perwakilan dan kemudian disusul oleh lembaga eksekutif yang akan menjadi pengendali pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikenal tiga jenis daerah otonom di Indonesia: Propinsi, Kabupaten dan Kota. Demokrasi perwakilan yang dimaksud diwujudkan melalui lembaga DPRD di tiga daerah otonom tersebut dan lembaga eksekutifnya adalah Pemerintah Daerah masing-masing yakni KDH beserta perangkatnya yang memiliki sebutannya masing-masing.

Lahirnya eksekutif dan birokrasi (lokal) di samping lembaga-lembaga politik tadi sudah ada sejak negara bangsa ini ada karena kebijakan desentralisasi yang sudah ada sejak dulu. Dengan demikian seringkali otonomi daerah yang dimiliki masyarakat dikalahkan oleh kepentingan birokrasi yang sudah memiliki informasi yang lebih banyak perihal pemerintahan tersebut. Dalam derajat tertentu, kondisi tersebut perlu mendapat imbang kemampuan masyarakat menjadi pengawas kerja birokrasi lokal dalam rel-rel demokrasi demi kepentingan bersama.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat salah satunya yakni pada saat pengisian jabatan politis, anggota DPRD dan kepala eksekutif di masing-masing Daerah. Sekarang ini, kepala eksekutif dipilih langsung oleh masyarakat. Ini pun merupakan alat pengawasan yang paling tinggi dari masyarakat kepada kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai akibat dari desentralisasi tidak lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan satu ‘value’ yang hendak dicapai dalam pemerintahan sebuah negara bangsa. Nilai tersebut sejalan dengan nilai demokrasi yang perwujudannya dilalui dengan ditampungnya aspirasi masyarakat yang luas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Adanya organ politik dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa perlunya akses masyarakat terhadap mekanisme pengisian jabatannya. Memang selama ini dapat dilalui dengan demokrasi perwakilan.

2.5 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Politik

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang.

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “ sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.” (QS.An-Nisa: 58)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam). Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakan dalam sebuah negara yang baik yaitu:

1. Nilai keadilan

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ...apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia maka
hendaklah engkau memutuskan dengan adil” (QS. An-Nisa: 58)

Berdasarkan ayat diatas prinsip keadilan merupakan suatu nilai kebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adil terhadap rakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa kekuar dari jalur keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

2. Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah sidiq yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: ...dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab:70)

Berdasarkan ayat diatas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang



tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak.

3. Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat disetiap massa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: ...setiap manusia(masyarakat) diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang” (QS. Al-Maidah: 48)

Berdasarkan ayat diatas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.

4. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Nilai-nilai yang luhur harus diterapkan dalam kehidupan politik. Masyarakat bangsa indonesia dengan penerapan nilai Islami pada kehidupan politik masyarakat. Akan mengubah pola



pikir, dan tingkah laku individu atau masyarakat tersebut. Al-Quran memberikan tuntunan pada masyarakat:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi

mereka selain Dia” (QS. Ar-Rad: 11)

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat atau

pemerintah itu tergantung pada sikap mental pelakunya, masyarakat pun dituntut

untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik. Untuk mengubah tatanan

kehidupan masyarakat. Partisipasi politik yang disalurkan merupakan suatu

prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dalam masyarakat

merupakan salah satu bentuk partisipasi publik untuk menuju masyarakat madani.

Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat pada pemerintah yang

berlaku dalam kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku

dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan

kata lain ikut berpartisipasi.

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasuldand Ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An-Nisa: 59)

Berdasarkan ayat diatas kepatuhan terhadap pemimpin merupakan suatu kepatuhan terhadap suatu pemerintah yang berjalan. Pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta konsekuen melaksanakan perintah Allah dan RasulNya dan menjauhi larangannya. Artinya ia memiliki integritas kepribadian, soleh pribadi, soleh sosial dan bertanggung jawab.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang peranan komisi pemilihan umum kabupaten Kampar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

1. Yayang Novita Sari (2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Dalam jurnalnya yang berjudul “Peran dan Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat demi terwujudnya pemerintahan daerah yang Demokratis .” Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu:

- a. Upaya KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, pemilih pemula, penayandang disabilitas, menyebar brosur, memberikan pamphlet dan diletakkan di tempat yang strategis.
 - b. Kendalanya pada saat peningkatan partisipasi adalah kurangnya dukungan finansial untuk melakukan sosialisasi serta kurangnya relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi.
 - c. Solusi yang dilakukan KPU guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat terutama untuk pemilih pemula serta melakukan evaluasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul pada saat sosialisasi.
2. Sirajul munir (2015), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penelitiannya yang berjudul “peran komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.” Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu: upaya KPU Kabupaten sumenep untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: metode tatap muka dan dialog, moblisasi, media massa, bahan sosialisasi, pemanfaatan aktifitas warga serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan. Metode sosialisasi tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain: seperti PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (Panitia pemungutan suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Muhammad Fadhlul Abrar (2018) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.” Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu: Dalam meningkatkan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan berbagai macam agenda sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang sesuai dalam peraturan komisi pemilihan umum itu sendiri, akan tetapi segala upaya tersebut terkesan dilaksanakan seadanya saja dan belum terlaksana.

2.7 Defenisi Konsep

defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (singarimbun 2006:33)

adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

1. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses kelangsungan.

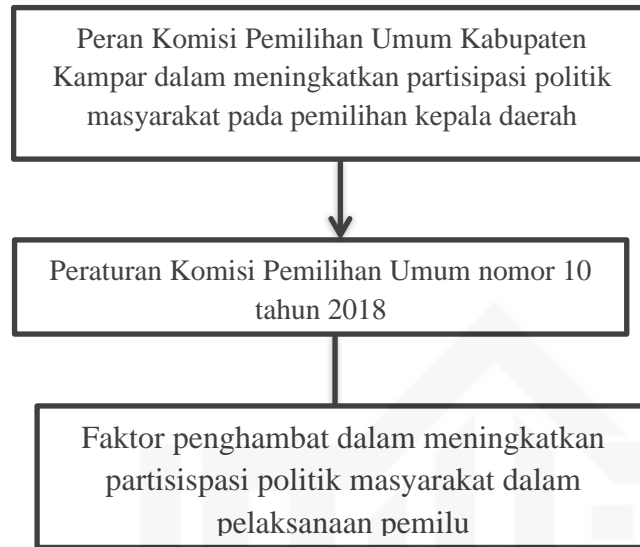


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (asshiddiqie, 2006:236-239).
3. Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

2.8 Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Variabel/Indikator Penelitian

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang Variabel, Indikator dan Subindikator dari konsep yang digunakan peneliti pada penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Peranan KPU Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati tahun 2017	1. Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan informasi mengenai tahapan proses penyelenggaraan pemilu kepada warga masyarakat melalui Road Show. - penyampaian informasi tentang jadwal penyelenggaraan pemilihan melalui media cetak maupun elektronik. - dan memberikan pemahaman tentang program pemilu kepada masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2. Pendidikan Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan, pemahaman pemilih melalui pendidikan, pelatihan ataupun bimbingan teknis (bimtek) kepada PPK, PPS, KPPS, Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, masyarakat umum. - memberikan materi untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilu kepada basisbasi pemilih yaitu, antara lain: Pemilih Pemula, Muda, Keluarga, Perempuan, Keagamaan, Komunitas, kaum marjinal, Penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, warga internet (netizen).
Partisipasi Politik Masyarakat	1. Hak dan Kewajiban warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu. - ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan KPU terkait pemilu. - ikut serta dalam setiap tahapan pemilu. - menjaga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau	2. Keterlibatan Warga Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, Seperti menjadi anggota penyelenggara pemilihan. - keterlibatan dalam tahapan pemilu seperti ikut dalam penyelenggaraan pemilu, ikut mencoblos, ikut dalam kampanye politik dan lain sebagainya. - keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, seperti ikut dalam rapat pleno keputusan hasil perolehan suara pemilu.

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya bukan hanya dari hasil pedoman wawancara tetapi dengan menggunakan wawancara mendalam, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang dilapangan untuk dapat menjadi instrument yang baik, peneliti dituntut untuk memiliki maupun yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, dalam hal ini instansi atau lembaga yang terkait dalam penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dengan fokus pada peranan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. wawancara dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kabupaten



Kampar. Adapun waktu dalam penelitian ini yaitu dari tanggal 23 Februari – 6 Mei 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis

jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara dengan informan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara, yaitu dengan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan objek atau masalah yang berhubungan dengan penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain, literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, karya ilmiah, petunjuk pelaksana teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian

Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja.

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas sastra, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN/STATUS	KETERANGAN
1	Yatarullah, S.Ag, SH, M.Hum	Ketua KPU Kabupaten Kampar Tahun 2017	Key informan
2	Syahrizal, SH	Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Kampar	Key informan
3	Tamarudin, S.Pd. I	Ketua DPD PKS Kampar	
4	Janan Taib	Tokoh Masyarakat	
5	Armeta	Masyarakat	

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Informan tersebut dipilih dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu menarik sampel dengan pertimbangan-pertimbangan. Adapun informan diatas dianggap paling mengerti tentang kajian dan objek yang sedang diteliti dan informan dianggap sebagai pelaksana dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2017.



3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, dari para informan kunci. Teknik penganalisanya didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, informasi, kemudian data yang diperoleh akan di analisis sehingga akan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditentukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka, Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung



4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja.

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11 289,28 km². Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1 365,97 km² atau sekitar 12,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar dipimpin oleh pasangan Bupati H. Azis Zaenal, SH, MM dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto, SH, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan mulai 22 Mei



2017 sampai sekarang, namun karena Bupati Kampar meninggal maka wakil bupati naik menggantikan bupati sebelumnya, adapun bupati saat ini yaitu Catur Sugeng Susanto, SH tanpa di temani wakil karena sampai saat ini belum ada hasil keputusan tim koalisi terkait siapa yang menjadi wakil bupati kampat mendampingi Catur Sugeng Susanto.

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Kampar di era Aziz Zaenal dan Catur

Sugeng Susanto

Visi Kabupaten Kampar adalah sebagi berikut : *“Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, dalam Lingkungan Masyarakat Agamis tahun 2025”*

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka misi pembangunan yang harus dilaksanakan adalah:

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional.
2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional.
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju.
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.



4.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah Berdirinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Sejarah KPU Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapansumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administrative untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.



4.2.2 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

4.2.3 Kewenangan

Wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

4.2.4 Visi Dan Misi

Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun lah misi sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas;
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efesien, Transparan, Akuntabel dan Akses;
3. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
4. Mengelola Data Pemilu yang Akurat, Menyeluruh, Bersikenambungan dan Mutakhir untuk pelayanan dan Menajemen Pemilu;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Menyusun Regulasi yang memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan Partisipatif;
6. Melayani Hak Pemilih Serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih;
7. Melayani Peserta Pemilu secara Adil; dan
8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksana Tugas KPU66
9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4.2.5 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

1. Ketua KPU

Tugasnya :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan.

2. **Sekretariat**

Tugasnya :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Bidang divisi umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

Tugasnya :

- a. Administrasi perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- e. Kerumahtanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

4. **Bidang teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan**

Tugasnya :

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Pencalonan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD

5. Bidang devisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan

Tugasnya :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pemutakhiran data pemilih;
- c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
- d. Pengelolaan jaringan IT ;
- e. Scan hasil pemilu;
- f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;

6. Bidang divisi hukum mempunyai tugas terkait dangan kebijakan:

Tugasnya :

- a. Pembuatan rancangan keputusan
- b. Verfikasi partai politik;
- c. Verfikasi DPD;
- d. Pelaporan dana kampanye;
- e. Telaah hukum;
- f. Advokasi hukum;
- g. Sangketa pemilu;



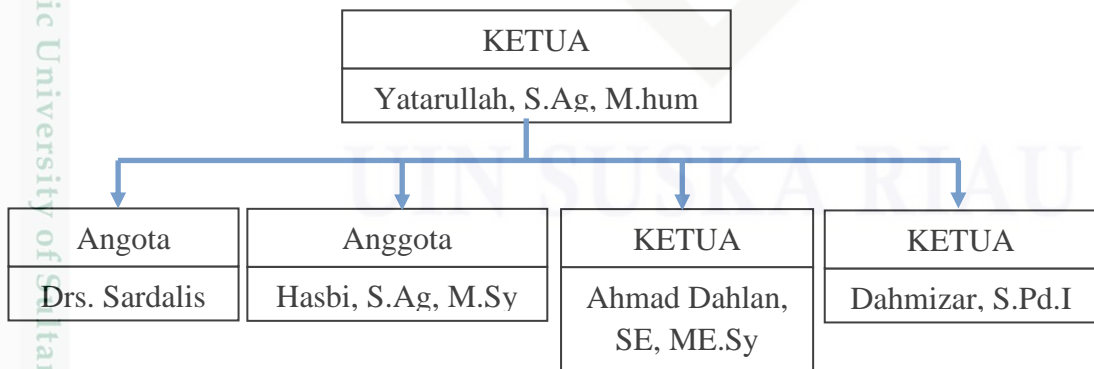
- h. Dokumentasi hukum;
- i. Pengawasan/pengendalian internal

7. Bidang divisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas kredit dengan kebijakan:

Tugasnya :

- a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
- b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock;
- c. Diklat dan pengembangan SDM;
- d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e. Kampanye;
- f. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
- g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- h. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Kampar
2014 s/d 2019**



**Bagan 4.1 Struktur Kepengurusan komisioner KPU Kabupaten Kampar
2014 s/d 2019**



4.2.6 Bagian Atau Unit Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (KPU KAMPAR) terdiri dari 5 orang Komisioner dan 1 sekretaris yang dibawahnya terdapat 4 Kepala Sub Bagian yaitu : Kasubag Keuangan Umum dan Logistik; Kasubag Hukum; Divisi Teknis dan Hubmas; Kasubag Program dan Data, yang di bantu oleh beberapa orang Pelaksana.

Jumlah Pegawai Pada KPU Kampar Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini tahun 2021 berjumlah 12 orang dan tenaga honorer berjumlah 21 orang.

1. **Ketua, Anggota dan Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membentuk PPK,PPS dan KPPS serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan dalam wilayah kerjanya.
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan membuat Berita Acara.⁶⁷
- g. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menumumkan calon anggota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten.
- i. Memeriksa pengaaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS danKPPS.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten.
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota PPK,PPS,sekretaris KPU dan Pegawai secretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan perundang-undangan.
- l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupten kepada Masyarakat.
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang yang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

a. Ka.Subag Umum dan Staf Pelaksana Subag Umum

- 1) Mengelola dan menyusun rencana subagian umum.
- 2) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat dan ekspedisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun dan melakukan urusan penomoran pengetikan, dan pengadaan naskah dinas.
- 4) Menyusun dan melakukan Urusan perlengkapan
- 5) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga.
- 6) Menyusun dan mencatat surat masuk dan surat keluar
- 7) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
- 8) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
- 9) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas keluar
- 10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
- 11) Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif
- 12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara
- 13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten.
- 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten.
- 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU kabupaten.
- 16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain⁶⁹
- 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

b. Ka.Subag.Data dan Program dan Staf pelaksana Subag.Data

- 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
- 2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun dan melakukan data pemilih
- 4) Mengumpulkan dan menyiapk bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait.
- 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan.
- 6) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu.
- 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.
- 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu
- 9) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervise penyelenggara pemilu
- 10) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data.
- 11) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten
- 12) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
- 14) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten.
- 15) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU.
- 16) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ka.Subag.Logistik dan Staf pelaksana Subag. Logistik

- 1) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Logistik
- 2) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu
- 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya
- 4) Mengalokasikan barang keperluan pemilu
- 5) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu
- 6) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten
- 7) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten
- 8) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten
- 9) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain
- 10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

d. Ka.Subag.hukum dan Staf pelaksana Subag.hukum

- 1) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu
- 2) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hokum
- 4) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu
- 5) Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual partai politik peserta pemilu
- 6) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya
- 7) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD kabupaten
- 8) Menyusun lapporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- 9) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta pemilu
- 10) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta pemilu
- 11) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informaasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu
- 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum
- 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum

15) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah

16) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten

17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU kabupaten

18) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum

19) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan

e. Ka.Subag. Keuangan dan Staf pelaksana Keuangan

1) Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan

2) Member informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten

3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan

4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK)

5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru

6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
- 8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
- 9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- 10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 11) Menyusun dan membantu mengawasidan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- 12) Menyiapkan dan menyusun mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu
- 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
- 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten
- 15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten
- 16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten
- 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain
- 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar tahun 2017, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk dapat memberikan edukasi tentang Pilkada pada masyarakat sehingga dapat meminimalisir pemikiran yang apatis terhadap konteslasi politik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pedoman teknis pilkada Kabupaten Kampar 2017 yang ditujukan pada partai politik, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa. Selain itu KPU Kampar juga mengadakan program KPU Roadshow, KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus.

Adapun faktor-faktor yang menghambat peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 antara lain yaitu minimnya pendanaan dan minimnya SDM KPU Kabupaten Kampar sehingga jangkauan KPU kabupaten Kampar dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih tatap muka sangat sempit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6.2 Saran

Dari analisis dan temuan penulis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar penting melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih harus menggunakan strategi memotivasi dan pengayoman kepada masyarakat, hal tersebut guna membentuk kepribadian masyarakat agar kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada kandidat yang akan mereka pilih dan kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus lebih meningkatkan pengawasan bahkan pemantauan langsung ke lapangan akan kinerja petugas penyelenggaraan pemilihan sampai ke tingkat Desa atau Kelurahan, karena tidak setiap petugas penyelenggara tersebut yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus lebih giat lagi dalam melakukan strategi dan inovasi dalam menciptakan kesadaran masyarakatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, karena sekarang ini masyarakat lebih tertarik dengan pidato politik dari beberapa partai dari pada pendidikan yang disampaikan KPU Kampar itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu..* Pustaka Mahardika. Yogyakarta
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Fadjar Mukthie. 2012. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi.* Setara Press. Malang.
- Bakir, R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Kharisma Publishing Group. Tangerang.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Rajawali Press. Jakarta.
- Samuel, P. Huntington dan Joan Nelson. 1990. *Partispasi Politik di Negara Berkembang.* Rineka Cipta. Jakarta.
- Bolgherini, Silvia. 2010. *Participation..* University Chicago. Chicago
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada da Dinamika Politik Lokal.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang nomor 07 tahun 2017 BAB XVII Pasal 448 Tentang partisipasi Masyarakat ayat (1) dan (2).

Lampiran 1

REKAPITULASI WAWANCARA PENELITIAN

NO	NAMA/JABATAN	WAKTU	HASIL WAWANCARA
1	Yatarullah, S.Ag, SH, M.Hum	27 April 2021	<p><i>“Yang pasti untuk langkah awal tentu kita buat pedoman teknis bagaimana desain dan tahapan pemilihan yang ideal, supaya pemilihan bisa terarah dan semua tim ada pegangan dalam berkompetisi begitu ya”</i></p> <p><i>“sasaran utama kita partai politik terlebih dahulu karena mereka merupakan peserta dari pemilihan Bupati dan wakil bupati, selain itu partai politik memiliki basis yang cukup militan untuk dapat mensosialisasikan pedoman pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil ini. Jadi memang sarana utama partai politik.”</i></p> <p><i>“Media massa cetak maupun online kita undang karena melalui merekalah kita bisa menebarkan informasi dengan lebih cepat dan merata.”</i></p> <p><i>“sosialisasi kita lakukan dipasar juga. Kita pilih 5 pasar terbesar di Kampar. Pasara kuok, airtiris, tapung Kampar dan bangkinang. Hal ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.”</i></p> <p><i>“Kalau orang tua itu kan mereka sudah banyak pengalaman. Jadi tanpa sosialisasipun mereka bisa memilih dan menggunakan hal pilihnya. Tapi kalau anak sekolahan dan mahasiswa yang baru pertama kali memilih ya harus dibangun sikap yang menjunjung nilai untuk menggunakan hak pilihnya.”</i></p> <p><i>“KPU Go to School itu ke sekolah-sekolah SMA ya. kita datang ke sekolah yang terjangkau dan punya siswa banyak. Kita disana yang</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bagaimana tatacara memilih dan memberikan penekana supaya mereka menggunakan hal pilihnya”

“pada prinsipnya dalam setiap kesempatan sosialisasi itu, kami juga menanamkan pendidikan pada pemilih. Selain memberikan informasi tentang pilkada, tapi juga menanamkan nilai dan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik setidaknya mencoblos.”

“kita bekerja sama dengan instansi atau komunitas terkait. Seperti sosialisasi pendidikan pemilih perempuan dan basis keluarga itu kita kerja sama dengan organisasi PKK Kabuapten Kampar, kemudian guru TK dan paud.”

“kan saya tadi juga udah bilang kalau kita itu ya memang mau menyabrkkan informasi ke seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum disabilitas. Karena mereka tetap memiliki hak pilih. Kekurangan-kekurangan dalam diri mereka tidak membuat hal pilih mereka hilang.”

“Rumah Pemilu KPU ini kami buat di kantor KPU jadi kayak menjadi base camp bagi orang-orang yang mau belajar tentang pemilihan umum. ini berisikan informasi-informasi penting.”

“perkembangan jaman ini sangat pesat dan salah satu perkembangannya itu salah satunya ya media social. Kadang malah anak muda lebih sering liat medsos. Untuk medsos kita punya facebook yang diupdate terus untuk memberi informasi”

“untuk meningkatkan kordinasi kita akan melakkukan pelatihan dan bimbingan teknis supaya petugas lebih paham dan mahir dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			<p>mengerjakan tugasnya” “kita ajukan 35 miliar dari awal sampai selesai. Tapi akhirnya hanya cair 28 miliar. Karena itu yang disetujui. Yang paling banyak habis di honor” “untuk hari H pencoblosan saja sudah cukup. Tapi untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan ini ya kurang sekali.”</p>
2	Bapak Syafrizal	29 April 2021	<p>“Pedoman ini langsung kita sosialisasikan kepada pihak-pihak yang harus diedukasi. Seperti partai politik, pasangan calon bupati dan wakil hingga LSM dan pastinya masyarakat secara luas” “Mau tidak mau parpol dulu ya. karena mereka peserta jadi kita bisa diskusi dengan dengar pendapat parpol dan melakukan perubahan terlebih dahulu sebelum pedoman ini fix dan dipublikasikan ke masyarakat. Karena pasti tau hal-hal yang bisa meberatkan mereka” “Media massa merupakan pilar demokrasi yang harus ikut sertakan jadi media ini kan juga mempermudah kerja kita dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Terus LSM dan tokoh Masyarakat itu juga tidak kita pungkiri juga bisa berkontribusi mensosialisasikan pelaksanaan dengan baik” “yang pasti selain memberitahukan akan ada pilkada, kita juga akan berkewajiban untuk memberikan gambaran pentingnya untuk memilih, jangan golput dan yang pasti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak golput. Kalau kami biasanya memberikan pidato dengan mobil yang ada pengeras suara” “yang kesalnya itu ya kita kadang tidak mendengarkan waktu menyampaikan sosialisasi. Kadang juga soundsystem yang kalah keras</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>dengan orang nawar cabe jadi ya. susah juga dpasar tuh tapi kan kita tetap usaha. Karena memang niat kita mau menyadarkan pentingnya memilih”</p> <p>“potensi dan kuantitas anak muda yang termasuk pemilih pemula cukup banyak di Kabupaten Kampar. Jadi perlu sekali sosialisasi yang bisa menysasar mereka. Ya kita adakan KPU goes to School dan KPU goes to Campus. Jadi kita langsung dating kesekolah-sekolah dan kampus yang ada di Kabupaten Kampar.”</p> <p>“mahasiswa ini kan energik dan kritis. Jadi partsipasinya dalam pilkada ini sangat dibuthkan. Baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak lain sepeprti tim sukses dll. jadi kita harus memberikan informasi dan penekanan bahwa sebagai seorang mahasiswa yang baik kita bisa berpartisipasi dalam pilkada dan ikut aktif untuk menggerakkan masyarakat untuk meilih bupati”</p> <p>“itu yang KPU roadshow, Kpu goes to school dan lain lain itukan juga pendidikan pada pemilih. Jadi sejalan semuanya dilakukan”</p> <p>“untuk segmen pemilih khusus ini pada prinsipnya kita kerja sama. Kalau bukan mereka ya minta berrti kami yang menawarkan diri. Kita dating ketika meraka melakukan kegiatan juga. Jadi sambil menyelam minum air. Seperti ada wirid pengajian ibu-ibu di bangkinang kota yang katanya banyak pesertanya ya kami tawarkan diri untuk sosialisasi.”</p> <p>“kaum disabilitas ini kan juga punya hak pilih, jadi secara tidak langsung mereka juga punya kewajiban untuk memilih. Berdasarkan pengalaman memang kaun disabilitas ini juga suaranya</p>
---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>minim. Jadi kita mau adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat.”</p> <p>“biasanya kita kan aktif dating ke acara orang atau instansi lain, tapi rumah Pemilu KPU ini ada lah tempat dimana dilaksanakannya pendidikan bagi warga masyarakat yang belum mengerti tentang pemilihan umum.”</p> <p>“ya kita juga sering meminta media online, media berita online dan surat kabar, korang untuk memasukkan berita-berita tentang pemilu supaya pemilih mendapatkan mendidikan yang baik”</p> <p>“kita melaksanakan bimtek itu kepada PPK, terus PPK ke PPs dana begitu seterusnya”</p> <p>“iya cuman 28 milliar, lebih dari setengah untuk honor, sebagian untuk pengadaan alat baru sebagian untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih”</p> <p>“ya kita berusaha aja. Karena pehambahan personil untuk sosialisasi saja susah. Dan kita juga sulit merekrut orang yang memilih pemahaman terhadap pemilu yang tinggi. Yang pasti juga dihadapkan degan dana yang minim”</p>
3	Tamarudin, S.Pd.I	30 April 2021	<p>“saya sebenarnya juga suda lupa-lupa ingat tapi yang saya ingat pelaksanaannya berjalan lancar hanya saja karena menunggu kehadiran peserta dari parpol. Jadi agak terlambat dan molor. Namun secara esensi sudah bagus dan peserta dari pasrtai politik juga merasa diajak berastisipasi untuk merevisi pedoman kalau ada yang kurang. Tapi waktuitu sudah pas rasanya.”</p>
4	Ibu Arneta	30 April 2021	<p>“ya gimana ya, kita kan sibuk mau beli cabe, bawang, trus harus ada orang pidato. Ya kurang fokus. Tapi kita dengar karena pakai sound sistem. Tapi ya susah juga meenangkap semua yang</p>



			<i>sisampaikan”</i>
5	© Hak cipta milik UIN Suska Riau Bapak Janan Taib selaku Tokoh Masyarakat	04 Mei 2021	<i>“waktu itu kita diberikan sosialisasi tentang tata cara memilih, tapi secara khusus di sampaikan kepada kami selaku tokoh-tokoh masyarakat yang di dahulukan selangkah di naikan seranting yang ucapanya menjadi petuah tentu di tekankan sekali supaya tokoh masyarakat seperti kami dapat membantu KPU Kampar untuk sama-sama mensukseskan Pemilhan bupati. Jadi KPU mintak tolong supaya kami menjaga kondisi tetap kondusif”</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara dengan ketua KPU Kampar tahun 2017 bapak Yatarullah, S.Ag, SH, M.Hum pada tanggal 27 April 2021



Wawancara dengan sekretaris KPU Kampar tahun 2017 bapak syafrizal pada tanggal 29 April 2021



Wawancara dengan ketua DPD PKS Kampar bapak tamarudin, S.Pd.I pada tanggal 30 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Rumah Pintar Pemilu



Foto di depan kantor KPU Kampar



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat bapak janan taib pada tanggal 04 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Warga Masyarakat ibuk Arneta pada tanggal 30 April 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1436/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 23 Februari 2021 M
11 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. **Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

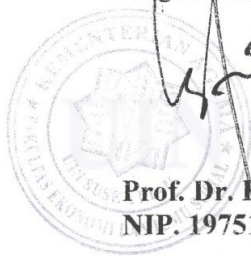
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Almanita
NIM : 11775201208
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 1975112 199903 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1359/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

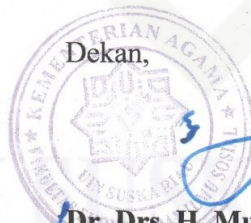
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Almanita
NIM. : 11775201208
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati
Kampar Tahun 2017"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/185

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39019 tanggal 24 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ALMANITA |
| 2. NIM | : | 11775201208 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KAMPAR TAHUN
2017 |
| 8. Lokasi | : | KPU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 5 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua KPU Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39019
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1359/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ALMANITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11775201208 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KAMPAR TAHUN 2017 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KPU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Alamat :JL. Tuanku Tambusai No. 69 Telp. (0762) 21099, 21081 Fax. (0762) 21199
BANGKINANG KOTA - RIAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ PP.09.3-Kt /1401/Sek-Kab/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar menerangkan :

Nama	: ALMANITA
NIM	: 11775201208
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KAMPAR TAHUN 2017
Lokasi	: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota , 05 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR



SYAFRIZAL



BIOGRAFI PENULIS

Almanita, adalah nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan orang tua yang bernama Abdul Muthalib dan Maria. Penulis lahir pada tanggal 21 Oktober 1998 di Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Riwayat pendidikan formal dimulai dari sekolah SD Negeri 017 Ranah Singkuang lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMPN 01 Kampar tamat pada tahun 2014 dan melanjutkan ke sekolah SMA Negeri 01 Kampar tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), melalui jalur undangan, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tamat pada tahun 2021.

Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Bulan Juli- Agustus 2020 di Kelurahan Limau Manis, Kabupaten Kampar. Serta melaksanakan program Pengalaman Kerja Lapangan (PKL) di KPU Kabupaten Kampar pada bulan Januari – Februari.

Kemudian berkat do'a dari keluarga dan juga anugerah ALLAH SWT penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul: **Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017** . Dan Alhamdulillah pada hari kamis 17 juni 2021 penulis telah melakukan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.